



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 1-2024-8259

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-01-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678110909528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196601192010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : MOH. WAHYONO	A7. NIK : 3313091901660002
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	3,320,600
2.	TUNJANGAN ISTRI	332,060
3.	TUNJANGAN ANAK	66,412
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	217,260
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	367,925
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	4,304,257
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	215,213
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	176,656
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	391,869
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	3,912,388
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	3,912,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 2-2024-8282

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-02-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109999528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196602132009021001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : KARDI	A7. NIK : 3372041302660003
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	6,781,700
2.	TUNJANGAN ISTRI	678,170
3.	TUNJANGAN ANAK	271,268
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	579,360
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	754,004
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	9,064,502
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	453,225
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	367,229
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	820,454
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	8,244,048
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	8,244,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 7-2024-8241

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-07-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 893223867528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196607051991031016	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : PARTONO	A7. NIK : 3313100507660006
A4. PANGKAT/ : Penata / III/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	41,804,300
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,180,430
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,303,560
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,462,601
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	50,750,891
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,537,545
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,701,150
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,238,695
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	46,512,196
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	46,512,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	782,548
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 9-2024-8247

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-09-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 776125866532000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196609251993011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : M. KUSUMAYANTO	A7. NIK : 3311082509660002
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	52,125,200
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,212,520
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,593,240
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,395,454
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,326,414
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,166,321
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,230,249
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,396,570
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	57,929,844
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	57,929,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	881,338
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 11-2024-8254

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-11-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 474244571528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 196611021998031003	
A3. NAMA : SUWARDI ARIS INDRIYATMOKO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 3313090211660003
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	70,427,038
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,020,000
6.	TUNJANGAN BERAS	941,460
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,196,073
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	81,584,571
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,079,229
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,832,294
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,911,523
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	74,673,048
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	74,673,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	20,673,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,033,600
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,033,600
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,369,831
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002

D.4 Tanggal
KARANGANYAR, 14 November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 11-2024-8276

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-11-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 241978048526001	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 196611061991032009	
A3. NAMA : LILIK ANUGRAHENI	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina Utama Muda / IV/c GOLONGAN	A7. NIK : 3313104611660001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	73,406,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	16,380,000
6.	TUNJANGAN BERAS	941,460
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,637,499
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	94,364,959
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,718,248
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,952,097
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,670,345
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	86,694,614
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	86,694,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	32,694,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,634,700
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,634,700
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	2,482,328
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8255

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 893976662528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196612072007011013	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUPONO	A7. NIK : 3313090712660001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,455,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,745,580
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,787,688
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,016,828
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,950,841
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,125,342
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,076,183
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	53,940,645
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	53,940,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	246,537
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8243

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 776232134528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 196705151993031018	
A3. NAMA : EKO ISMARYONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / IV/a	A7. NIK : 3313091505670003
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	65,798,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,579,880
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,280,566
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	85,247,006
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,262,350
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,944,695
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,207,045
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	78,039,961
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	78,039,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	19,539,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	976,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	976,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,201,584
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8272

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 481027159528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 196804181989031006	
A3. NAMA : TRI HARYONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A7. NIK : 3313111804680001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	72,970,282
2.	TUNJANGAN ISTRI	7,297,040
3.	TUNJANGAN ANAK	2,500,016
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,765,840
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,697,149
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	97,790,327
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,889,516
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,369,471
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	8,258,987
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	89,531,340
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	89,531,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	26,531,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,326,500
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,326,500
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,654,187
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8263

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 899278634528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196806102010011004	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUTARYO	A7. NIK : 3313091006680001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	929,768
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,775,236
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,883,884
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,994,194
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,119,871
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,114,065
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	54,769,819
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54,769,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	166,854
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8281

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678107699528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196904192008011007	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : AGUS PRIHANTORO	A7. NIK : 3313101904690001
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	50,807,952
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,080,800
3.	TUNJANGAN ANAK	1,016,160
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,025,288
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	64,971,840
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,248,592
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,319,113
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,567,705
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	59,404,135
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	59,404,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	226,345
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8274

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678110842528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196905211992101001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DAGDO PRAMONO	A7. NIK : 3313052105690001
A4. PANGKAT/ : Penata Muda Tk.I / III/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	55,565,600
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,556,560
3.	TUNJANGAN ANAK	954,588
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,896,800
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,269,878
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	70,243,426
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,512,171
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,531,760
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,043,931
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	64,199,495
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	64,199,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	1,199,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	59,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	59,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	291,308
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	192

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8258

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 668660657528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197001282007011006	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUGIMIN	A7. NIK : 3313082801700001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	44,601,200
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,460,120
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,656,556
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	55,745,636
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,787,282
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,997,497
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,784,779
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	50,960,857
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	50,960,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	232,886
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8246

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 579960071528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197010222007011022	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUNARTO	A7. NIK : 3313042210700002
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	49,981,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,998,140
3.	TUNJANGAN ANAK	999,628
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,009,940
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	64,030,748
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,201,537
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,279,152
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,480,689
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,550,059
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,550,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	178,391
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8279

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP	: 893976787528000	A5. NAMA JABATAN :	
A2. NIP/NRP	: 197104152009021002	NON FUNGSIONAL	
A3. NAMA	: ALIF SISWOHADI SUTIKNO	A6. JENIS KELAMIN :	☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/	: Pengatur Tk.I / III/a	A7. NIK	: 3313091504710002
GOLONGAN		A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,308
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,742,768
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	57,907,676
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,895,384
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,082,012
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,977,396
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	52,930,280
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	52,930,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	241,907
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null	D.4 Tanggal	
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025	
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002		



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8266

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP	: 776232183528000	A5. NAMA JABATAN :	
A2. NIP/NRP	: 197106161993031007	NON FUNGSIONAL	
A3. NAMA	: MARGONO	A6. JENIS KELAMIN :	☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/	: Penata Muda Tk.I / III/b	A7. NIK	: 3313091606710002
GOLONGAN		A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60,566,062
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,056,620
3.	TUNJANGAN ANAK	2,422,648
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,543,186
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	78,644,036
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,932,202
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,809,079
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,741,281
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	71,902,755
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	71,902,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	4,402,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	220,100
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	220,100
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	440,029
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null	D.4 Tanggal	
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025	
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8269

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 575713888528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197107021996121002	
A3. NAMA : JOKO PURWANTO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 3313090207710001
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	69,037,742
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,903,780
3.	TUNJANGAN ANAK	2,660,008
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	13,720,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,983,100
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,734,406
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	100,039,036
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5,001,952
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,200,715
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	8,202,667
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	91,836,369
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	91,836,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	28,836,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,441,800
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,441,800
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,859,182
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8244

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 740958277528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197109092009021001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SEMIN	A7. NIK : 3313150909710001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	41,920,200
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,192,020
3.	TUNJANGAN ANAK	1,676,808
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,590,252
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	56,434,800
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,821,740
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,945,696
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,767,436
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	51,667,364
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	51,667,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	157,341
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8260

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 486582711528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197305281993031007	
A3. NAMA : BUDI CAHYONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A7. NIK : 3313092805730003
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	68,882,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,888,280
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	13,720,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,635,624
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	95,154,464
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,757,723
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,084,965
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,842,688
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	87,311,776
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	87,311,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	28,811,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,440,500
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,440,500
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,897,857
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8253

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 077301596831000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197306171992032003	
A3. NAMA : YUNIAR SRI MURDASIH	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 7271015706730004
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	66,945,100
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	2,474,796
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	13,720,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,896,800
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,407,209
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	89,443,905
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,472,195
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,831,060
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,303,255
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	82,140,650
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	82,140,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	28,140,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,407,000
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,407,000
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,421,927
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	10,373

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8252

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP	: 888485539528000	A5. NAMA JABATAN :	
A2. NIP/NRP	: 197307032007011013	NON FUNGSIONAL	
A3. NAMA	: MARYONO	A6. JENIS KELAMIN :	☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/	: Pengatur / II/d	A7. NIK	: 3313150307730005
GOLONGAN		A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,041,794
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,704,180
3.	TUNJANGAN ANAK	1,881,672
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,835,178
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	62,518,344
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,125,917
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,185,813
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,311,730
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	57,206,614
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	57,206,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	173,258
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null	D.4 Tanggal	
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025	
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8277

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 893976746528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197308142009021001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SANTOSA	A7. NIK : 3313111408730004
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda Tk.I / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	41,484,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,148,480
3.	TUNJANGAN ANAK	1,659,392
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,570,524
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	55,918,716
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,795,936
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,925,487
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,721,423
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	51,197,293
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	51,197,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	155,905
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8285

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580111128528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197405122010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DWI HANDONO	A7. NIK : 3313041205740002
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	929,768
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,775,236
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,883,884
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,994,194
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,119,871
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,114,065
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	54,769,819
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54,769,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	166,854
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8257

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678110966528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197503292010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUMITRO	A7. NIK : 3313102903750000
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	929,768
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,775,236
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,883,884
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,994,194
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,119,871
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,114,065
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	54,769,819
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54,769,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	166,854
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8248

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 666667712528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197507042007011008	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SAMINO	A7. NIK : 3313090407750001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / II/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	37,408,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	3,740,800
3.	TUNJANGAN ANAK	534,400
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,751,960
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,342,780
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	48,777,940
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,438,897
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,695,651
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,134,548
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	44,643,392
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	44,643,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	86,020
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8261

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 579960063528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197606072008011008	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUWARNO	A7. NIK : 3313090706760002
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	49,256,792
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,925,690
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,918,874
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,129,116
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,056,456
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,208,163
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,264,619
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	55,864,497
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	55,864,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	275,744
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8271

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580067809528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197606271995121001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : BURHAM BARLIANTO	A7. NIK : 3313092706760002
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	53,191,558
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,319,160
3.	TUNJANGAN ANAK	2,127,664
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,196,450
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	69,890,352
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,494,518
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,468,848
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,963,366
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	63,926,986
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	63,926,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	292,166
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8265

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109973526000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197802082010011004	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUPRIYANTA	A7. NIK : 3372040802780024
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	172,432
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8245

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 486571680527000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197804031997031003	
A3. NAMA : BAKDO HARSONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina Utama Muda / IV/c GOLONGAN	A7. NIK : 3309050304780001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	68,564,804
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,856,490
3.	TUNJANGAN ANAK	2,742,596
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	28,350,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,225,067
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	114,794,477
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5,739,724
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,190,790
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	8,930,514
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	105,863,963
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	105,863,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	38,363,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,918,100
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,918,100
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	2,610,184
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8268

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 463063040528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197902262010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : KRIS WAHYU JOKO PURNOMO	A7. NIK : 3313092602790004
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda Tk.I / II/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	38,989,976
2.	TUNJANGAN ISTRI	3,899,000
3.	TUNJANGAN ANAK	1,559,600
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,451,980
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	52,956,076
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,647,804
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,809,692
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,457,496
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	48,498,580
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	48,498,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	147,662
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8251

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 732341508528000	A5. NAMA JABATAN : PERENCANA AHLI MUDA
A2. NIP/NRP : 197903252006041005	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DONO NUGROHO	A7. NIK : 3311042503790002
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60,316,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,031,600
3.	TUNJANGAN ANAK	2,412,640
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	15,400,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,385,789
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	91,601,549
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,580,077
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,802,604
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,382,681
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	84,218,868
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	84,218,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	16,718,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	835,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	835,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,017,456
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8286

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 736944448528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197910242008011006	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SURADI	A7. NIK : 3313042410790001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	44,601,154
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,460,120
3.	TUNJANGAN ANAK	1,784,048
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,717,586
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,618,428
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,980,921
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,070,131
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,051,052
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	54,567,376
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54,567,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	166,197
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8270

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 721137792528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198002142012121001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : EKO HARDIYANTO	A7. NIK : 3313111402800001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	44,601,154
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,460,120
3.	TUNJANGAN ANAK	1,784,048
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,717,586
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,618,428
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,980,921
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,070,131
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,051,052
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	54,567,376
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54,567,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	166,197
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8283

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP	: 893222133526000	A5. NAMA JABATAN :	
A2. NIP/NRP	: 198004142005011007	NON FUNGSIONAL	
A3. NAMA	: APRI DARMAWAN	A6. JENIS KELAMIN :	☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/	: Penata Tk.I / III/d	A7. NIK	: 3372011404800022
GOLONGAN		A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	58,378,496
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,837,860
3.	TUNJANGAN ANAK	2,335,144
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,441,300
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	76,048,320
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,802,416
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,709,596
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,512,012
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	69,536,308
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	69,536,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	2,036,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	101,800
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	101,800
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	317,867
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	: null	D.4 Tanggal	
D.2 Nama Instansi Pemerintah	: DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025	
D.3 ID Instansi Pemerintah	: 198104272009021002		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8287

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109916528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198006242010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SULARTO	A7. NIK : 3313092406800011
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	172,432
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8278

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678111022528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198104272009021002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DJOKO NUGROHO	A7. NIK : 3313102704810004
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	172,432
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8256

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109932528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198201122010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : CATUR IRIYANTO	A7. NIK : 3313151201820003
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	172,432
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8262

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 786306035528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198210302005021001	
A3. NAMA : SUKINO SUBIYANTORO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d	A7. NIK : 3313093010820002
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	56,595,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,659,500
3.	TUNJANGAN ANAK	2,263,800
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,937,464
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	79,071,284
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,953,564
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,626,817
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,580,381
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	72,490,903
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	72,490,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	4,990,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	249,500
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	249,500
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	440,725
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002

D.4 Tanggal
KARANGANYAR, 14 November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8275

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109965528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198404182010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : TRI AGUS PAMUNGKAS	A7. NIK : 3313091804840001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	172,432
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002

D.4 Tanggal
KARANGANYAR, 14 November 2025



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8267

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109924528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198405052010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : WARSITO	A7. NIK : 3313090505840001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,308
2.	TUNJANGAN ISTRI	3,320,600
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,738,080
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,689,616
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	56,236,604
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,811,830
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,018,920
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,830,750
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	51,405,854
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	51,405,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	241,907
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8242

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 559796719528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198406102010011028	
A3. NAMA : SRI ARIYA SANJAYA	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A7. NIK : 3313091006840002
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	54,867,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	1,013,880
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,593,204
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	66,034,484
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,301,724
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,233,887
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,535,611
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	60,498,873
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	60,498,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	6,498,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	324,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	324,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	321,651
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	3,249

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8284

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678107632528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198407132010011003	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : PEDET SUGIYARTO	A7. NIK : 3313091307840001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	172,432
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8273

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 899726319528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198501032011011012	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : TRI WIBOWO	A7. NIK : 3314030301850002
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	53,191,558
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,319,160
3.	TUNJANGAN ANAK	2,127,664
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,196,450
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	69,890,352
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,494,518
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,468,848
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,963,366
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	63,926,986
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	63,926,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	292,166
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8249

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 103061803528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198601042010011003	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : ARI SETYAWAN	A7. NIK : 3313090401860003
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda Tk.I / II/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	41,484,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,148,480
3.	TUNJANGAN ANAK	1,659,392
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,570,524
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	55,918,716
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,795,936
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,925,487
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,721,423
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	51,197,293
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	51,197,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	155,905
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 14 November 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8288

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 899726327532000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198703252011012019	
A3. NAMA : RIRIN SETIAWATI, SH	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A7. NIK : 3311086503870001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	53,191,596
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,319,160
3.	TUNJANGAN ANAK	1,063,832
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,740,576
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	72,916,804
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,645,840
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,425,537
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,071,377
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	66,845,427
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	66,845,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	12,845,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	642,200
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	642,200
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	457,094
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	187,106

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2024-8264

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 854613403445000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 199512142018081001	
A3. NAMA : EFAN RISWAYA PRATAMA	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata / III/c GOLONGAN	A7. NIK : 3272051412950002
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	44,933,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,493,350
3.	TUNJANGAN ANAK	589,740
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,679,540
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,351,211
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	62,607,341
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,130,367
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,043,068
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,173,435
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	57,433,906
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	57,433,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	212,179
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 14 November 2025
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	

